

**LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
PERIODE 2011-2014**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)  
Akuntansi**



**DISUSUN OLEH :  
EKKA KURNIA SARI  
NIM : 041310113064**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2016**

## LEMBAR KTM



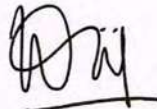
LAPORAN  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERIODE  
2011-2014**

Disusun Oleh :  
Ekka Kurnia Sari  
NIM : 041310113064

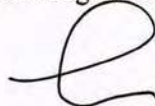
Telah disetujui dan diterima dengan baik

Dosen Pembimbing



Wulandari Fitri Ekasari, S. Ak., M. Sc., Ak., CFP Tanggal.....6-6-2016.....  
NIP : 19890507 201504 2 001

Ketua Program Studi Diploma Akuntansi



Amalia Rizki, SE, M.Si., Ak., CA  
NIP : 19760412 200312 2 003

Tanggal.....6 Juni 2016.....



Tanggal.....6-6-2016.....

## LAPORAN ORISINALITAS LAPORAN PKL

Saya, Ekka Kurnia Sari (041310113064) menyatakan bahwa :

1. Laporan PKL saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan dan penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.
2. Dalam laporan PKL ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain selain dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 06 Juni 2016



Ekka Kurnia Sari  
041310113064

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Akuntansi.

Dalam proses penulisan laporan ini, saya memperoleh banyak bimbingan, dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala hormat saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan berkah dan rahmatNya, penulis bisa menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
2. Prof. Dr. Dian Agustia, SE, M.Si., Ak., CMA, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.
3. Prof. Dr. H. Widi Hidayat, M.Si, Ak., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
4. Amalia Rizki, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
5. Wulandari Fitri Ekasari, S. Ak., M. Sc., Ak., CFP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan motivasi dalam bimbingan dan pengarahan selama penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
6. Dr. rer. pol. Debby Ratna Daniel, SE. Ak., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan atas penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
7. Pak Ruliono, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Chalid SE. MM selaku Kepala Bidang Kas dan Akuntansi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.



8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya Bapak Tubi dan Ibu Supiyah yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata betapa besar pengorbanan kalian berdua, adik saya Dhavina Safa Felisha dan seluruh keluarga besar saya.
10. Terima kasih kepada Bidang Kas dan Akuntansi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya terutama Pak Chalid, Bu Fida, Mbak Dian, Mas Gerry, Pak I'im, Bu Windah, Pak Pipit, Mbak Devi dan seluruh staff yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu membimbing saya selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
11. Teman-teman seperjuangan saya selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Intan, Bhrellian dan Atika yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat.
12. Rahmat Rizky Fitrianto yang senantiasa ada saat suka dan duka, memberikan dukungan, semangat, hiburan, dan nasihat kepada saya dalam segala hal terlebih dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
13. Terima kasih saya kepada Intan, Orient, Mely, Firas, Mar'atus, Aini, Donna, Windah, Nariman, Farah, Made, Ajeng, Ayu, Astrid, Febi, Linna, Thalia dan semua teman-teman Akso angkatan 2013 atas segala dukungan, kerjasama, semangatnya dalam berjuang bersama menyelesaikan pendidikan di Diploma III Akuntansi ini.
14. Terima kasih kepada sahabat saya Mega, Aji, Triyo, Faisal, Defvi, Raka, Mail, Valdi yang selalu ada disaat suka maupun duka.
15. Untuk semua pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan, nasihat, doa dan semangat dalam penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan.

Akhir kata semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat membantu dan memberi manfaat bagi siapapun, khususnya bagi pembaca.

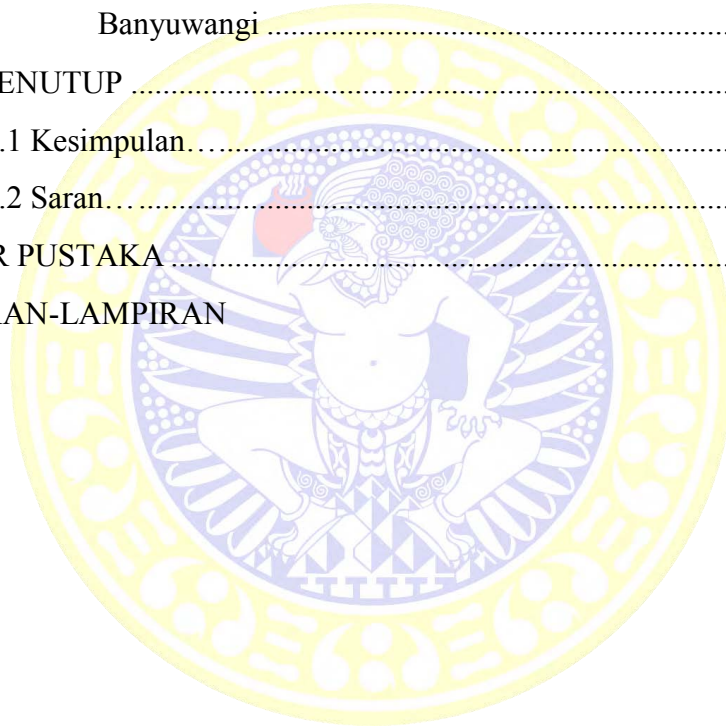
Surabaya, 06 Juni 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR KTM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR ORISINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Teori .....	3
1.2.1 Otonomi Daerah.....	3
1.2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	4
1.2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	6
1.2.4 Belanja Daerah.....	6
1.2.5 Manajemen Keuangan Daerah.....	7
1.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	8
1.2.7 Struktur Organisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	9
1.2.8 Laporan Realisasi Anggaran.....	9
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	10
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	10
1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	11
1.6 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	12
BAB 2 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....	13
2.1 Gambaran Umum Institusi .....	13
2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan.....	14

2.2.1 Struktur Organisasi.....	15
2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya.....	15
2.3 Pembahasan.....	28
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah... ..	28
2.3.1.1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.....	29
2.3.2 Belanja Daerah.....	30
2.3.2.1 Efektivitas Belanja Daerah Kota Surabaya.....	31
2.3.3 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya	32
2.3.4 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	34
BAB 3 PENUTUP.....	37
3.1 Kesimpulan.....	37
3.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



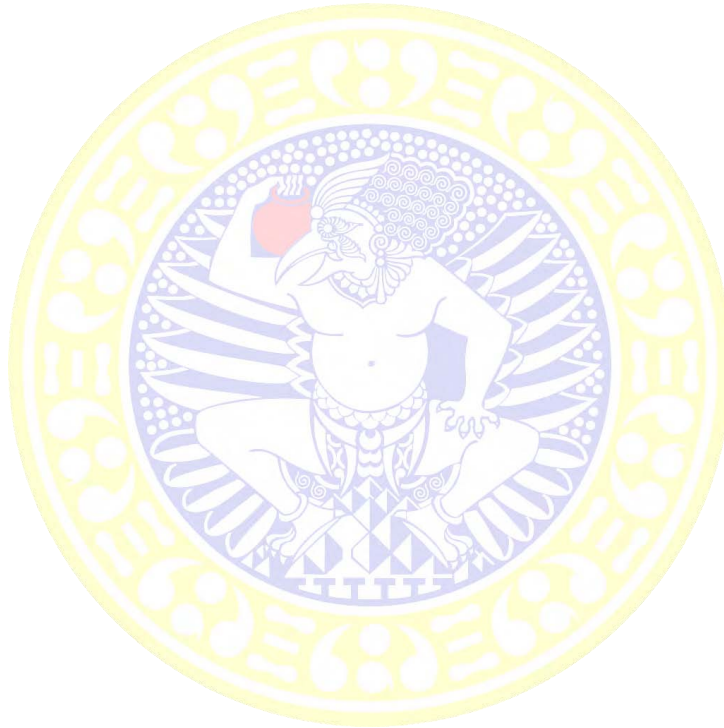


**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014.....	2
Tabel 1.2 Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014....	2
Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Tahun 2016.....	12
Tabel 2.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014.....	28
Tabel 2.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014.....	29
Tabel 2.3 Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014... ..	30
Tabel 2.4 Efektivitas Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014... ..	31
Tabel 2.5 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014.....	32
Tabel 2.6 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2011-2014.....	34

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya.....	15
Gambar 2.2 Grafik Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya.....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pengajuan Judul Laporan Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 2 Daftar Penilaian Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Kota Surabaya
- Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Kota Surabaya
- Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Kota Surabaya
- Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Kota Surabaya
- Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran 9 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran 10 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran 11 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki suatu daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan adanya hubungan yang seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang proporsional agar hasil yang diperoleh dapat maksimal, menciptakan keseimbangan hubungan tersebut dibutuhkan sumber pembiayaan yang memadai yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada kenyataannya masih ditemukan kendala untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Faktor terbesarnya adalah terbatasnya sumber pembiayaan dari PAD. Kebanyakan dari kabupaten dan kota belum mampu mencukupi Belanja Daerah (BD) dari sumber PAD yang mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka pemerintah pusat membuat kebijakan atas otonomi daerah yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan daerah serta regulasi pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sampai dengan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2001, yang merupakan kebijakan yang dianggap sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi. Desentralisasi memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat, hidup demokrasi, pemerataan, adil, dan pemeliharaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah termasuk Kota Surabaya dituntut untuk lebih mandiri mengelola keuangannya dan mencari sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi keuangan daerah. Karena itu, suatu daerah harus mampu mencari sumber pendapatannya sendiri karena indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber pokok penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surabaya yaitu berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, bagian laba daerah dan pendapatan lain-lain. Berikut ini adalah tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014**

PAD	Realisasi			
	2011	2012	2013	2014
Hasil Pajak Daerah	1.488.358.147.753	1.852.977.636.887	2.154.652.323.798	2.427.647.860.148
Hasil Retribusi Daerah	209.834.317.888	183.482.993.435	229.680.153.172	270.112.725.497
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	75.962.115.306	97.696.057.373	111.967.697.969	120.856.635.210
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	112.359.720.634	145.457.161.138	295.279.875.771	488.706.643.123
<b>Jumlah</b>	<b>1.886.514.301.581</b>	<b>2.279.613.848.833</b>	<b>2.791.580.050.710</b>	<b>3.307.323.863.978</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2014

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan yaitu tahun 2013 sebesar Rp 2.791.580.050.710 menjadi Rp 3.307.323.863.978 pada tahun 2014 dengan selisih Rp 515.743.813.268.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014**

Belanja Daerah	Realisasi			
	2011	2012	2013	2014
Belanja Pegawai	1.715.112.525.938	1.908.805.098.309	2.049.262.468.475	2.187.887.736.524
Belanja Barang dan Jasa	1.164.991.205.504	1.210.639.630.540	1.466.759.779.178	1.814.062.371.710
Belanja Bunga	2.903.307.374	2.223.619.192	0	0
Belanja Hibah	325.744.017.586	258.999.514.331	253.316.709.085	300.184.342.399
Belanja Bantuan Sosial	1.046.730.000	867.500.000	853.703.500	89.670.000
Belanja Bantuan Keuangan	644.213.000	644.208.000	604.305.000	787.920.000
Belanja Modal	543.111.645.989	912.716.142.120	1.281.394.616.149	1.404.366.425.421
Belanja Tidak Terduga	156.768.500	3.054.510.589	0	0
Belanja Bagi Hasil	0	1.200.000.000	5.088.082.959	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.753.710.413.891</b>	<b>4.299.150.223.081</b>	<b>5.057.279.664.345</b>	<b>5.707.378.466.054</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2014



Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya. Pemilihan instansi pemerintahan tersebut didasarkan pada keinginan untuk menambah ilmu dalam bidang akuntansi pemerintahan. Laporan Tugas Akhir ini adalah mengenai “**Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Periode 2011-2014**”. Adapun data yang diperlukan dalam analisis ini adalah Laporan Realisasi Anggaran.

## **1.2 Landasan Teori**

### **1.2.1 Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bastian, 2006:338)

Berdasarkan dasar hukum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah Indonesia diselenggarakan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan keragaman dan ciri khas daerah tersebut.
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus mencakup otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan utuh hanya berlaku pada wilayah daerah dan kota, secara otonomi di ranah masi terbatas, yang artinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga.

5. Otonomi daerah harus berlandaskan pada tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah kabupaten, sedangkan daerah kota tidak termasuk ke dalam wilayah administrasi. Hal tersebut juga berlaku bagi wilayah-wilayah yang mendapatkan pembinaan khusus dari pemerintah.
6. Pelaksanaan otonomi daerah juga harus mencakup peningkatan kualitas dan pelayanan badan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai legislatif, pengawasan, dan pelaksana anggaran penyelenggaraan otonomi daerah.
7. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilimpahkan pada pemerintah provinsi yang memiliki kedudukan sebagai wilayah administratif dan mendapatkan tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu yang tugasnya dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada desa dengan disertai pembiayaan, serta pembentukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pihak yang dilimpahi wewenang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban atas tugas yang dilimpahkan kepadanya.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan keunikan yang dimiliki daerahnya serta bagaimana keunikan dan kekayaan alam tersebut dapat menjadi modal utama pengembangan daerah. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pihak-pihak terkait serta partisipasi aktif dari masyarakat daerah itu sendiri, sebab pada dasarnya otonomi daerah dibuat agar masyarakat dapat turut berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

### **1.2.2 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Beberapa pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Rahman (2005: 38) “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi”.
- b. Menurut Warsito (2001: 128) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah”.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah  
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengolahan Daerah yang Sah  
Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

### 1.2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu :

- a. Hasil pajak daerah, yang merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah.
- b. Hasil retribusi daerah, menurut panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Riwu, 2005: 171) adalah pungutan dari daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bararti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.
- d. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

### 1.2.4 Belanja Daerah

Menurut Undang-undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

- a. Menurut Halim (2002:68), “Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”.
- b. Menurut Peraturan Daerah kota Surabaya No. 12 Tahun 2008 Belanja daerah dikelompokkan ke dalam :
  1. Belanja Langsung
    - a. Belanja pegawai
    - b. Belanja barang dan Jasa
    - c. Belanja modal



2. Belanja Tidak Langsung
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja bunga
  - c. Belanja subsidi
  - d. Belanja hibah
  - e. Belanja bantuan sosial
  - f. Belanja bagi hasil
  - g. Belanja bantuan keuangan
  - h. Belanja tidak terduga
3. Belanja Tidak Langsung
  - i. Belanja pegawai
  - j. Belanja bunga
  - k. Belanja subsidi
  - l. Belanja hibah
  - m. Belanja bantuan sosial
  - n. Belanja bagi hasil
  - o. Belanja bantuan keuangan
  - p. Belanja tidak terduga

### **1.2.5 Manajemen Keuangan Daerah**

Manajemen Keuangan Daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah. Manajemen Pelayanan Publik adalah pencerminan pemberian kewenangan wajib atas otonomi daerah dari Pemerintah Pusat. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD).



Karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu APBD, merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat empat dimensi:

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban
2. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dengan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana desentralisasi adalah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

### **1.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 (8) tentang Keuangan Negara).

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,
6. Fungsi Stabilitas. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **1.2.7 Struktur Organisasi Pendapatan dan Belanja Daerah**

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan pembiayaan. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

### **1.2.8 Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dan realisasi dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas laporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/APBD).
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah :

1. Memenuhi syarat kelulusan program Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Mengetahui penerapan teori yang diperoleh penulis selama kuliah di dalam dunia kerja.
3. Memperoleh data, keterangan dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diangkat.
4. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan topik.

### **1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis :
  - a. Sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi yang diperoleh selama kuliah.

- b. Menambah pengetahuan mengenai bagaimana praktik Akuntansi dalam dunia kerja.
  - c. Memperoleh pengalaman kerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
2. Bagi Almamater :  
Menjadi suatu tolak ukur pembelajaran dan sarana peningkatan kualitas pengajaran di masa yang akan datang.
  3. Bagi Perusahaan :
    - a. Membagi ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa untuk mengetahui kinerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
    - b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan baik antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dengan Universitas Airlangga Surabaya.

### **1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

Rencana kegiatan dari Praktik Kerja Lapangan ini yaitu :

1. Objek Praktik Kerja Lapangan  
Bidang : Akuntansi Pemerintahan  
Topik : Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Periode 2011-2014
2. Subjek Praktik Kerja Lapangan  
Nama Kantor : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya  
Alamat : Jl. Jimerto No. 25-27 Surabaya
3. Jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan  
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, waktu disesuaikan dengan jadwal perkuliahan dan kebijakan yang berlaku dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

### 1.6 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Tahun 2016

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya pada tanggal 22 Februari-31 Maret 2016 dengan penempatan kerja di bagian kas dan akuntansi dengan bidang yang diambil adalah Akuntansi Sektor Publik, topik “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Periode 2011-2014”.

**Tabel 1.3**

**Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Tahun 2016**

No	Kegiatan	Jan '16				Feb '16				Mar '16				Apr '16				Mei '16				Jun '16			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan Tempat dan Topik	■	■	■	■																				
2	Penyusunan Proposal			■	■																				
3	Pengajuan Permohonan izin lokasi Praktik Kerja Lapangan					■	■	■	■																
4	Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan									■	■	■	■												
5	Penyusunan Praktik Kerja Lapangan													■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Revisi Dosen Pembimbing																	■	■	■	■				
7	Presentasi Laporan PKL																								■



**BAB 2****PELAKSANAAN PKL****2.1 Gambaran Umum Institusi**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang bertempat di Jalan Jimerto 25-27 lantai II, Surabaya. DPPK adalah suatu instansi yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. DPPK terdiri dari beberapa bagian yaitu Sekretariat, Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Kas dan Akuntansi. Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pengelolaan pajak daerah, membina dan mengawasi pajak daerah dalam skala kota. Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Visi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya adalah sebagai berikut :

*“Pengelolaan keuangan pemungutan pajak yang profesional, transparan dan akuntabel”*

Adapun maksud dari visi tersebut tercermin dari tiga kata kunci yaitu :

- a. *Profesional* yang berarti selalu mengembangkan diri secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang ada, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
- b. *Transparan* sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah yang menghasilkan informasi keuangan daerah harus mampu menyajikan dan

menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai dengan perundang-undangan.

- c. *Akuntabel* yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Misi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya adalah sebagai berikut :

*“Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien”*

Arti dan makna misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya sebagaimana yang disebut diatas :

- a. *Efisien* yang dimaksud adalah bahwa dalam menyusun, melaksanakan, mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan yang ada di peraturan dan penjabaran APBD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya menggunakan sistem dan prosedur dalam pengelolaannya.
- b. *Efektif* yang dimaksud adalah dalam menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, pengguna APBD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

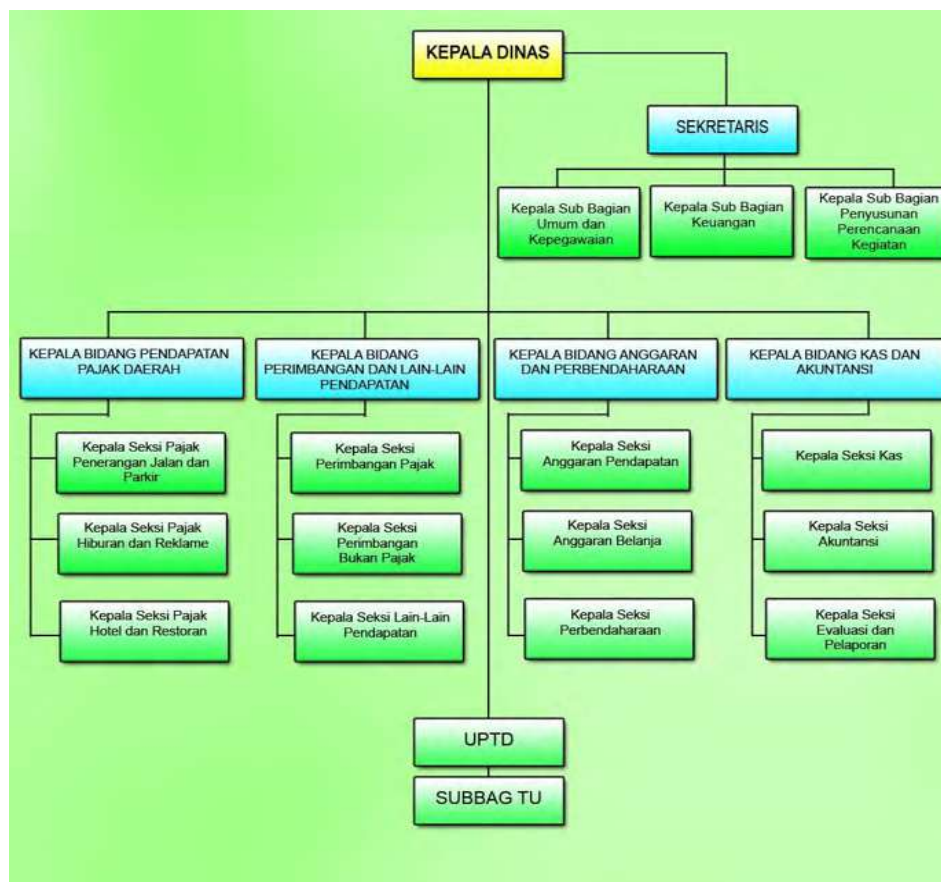
## **2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan**

Deskripsi PKL menjelaskan tentang Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah kota Surabaya Periode 2011-2014. Elemen-elemen analisis akan digambarkan oleh penulis mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah serta kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah.

### 2.2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Struktur organisasi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menggambarkan bagaimana pembagian tanggung jawab di tiap-tiap bidangnya.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan**



Sumber : [www.dppksby.com](http://www.dppksby.com)

### 2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya bagian Ketigabelas menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

### Pasal 191

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan. Bagian Ketigabelas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

### Pasal 192

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 191, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dalam pasal 191;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 1

#### Sekretariat

### Pasal 193

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang sekretariat.

### Pasal 194

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 193, sebagai berikut:

- a. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan laporan Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. pelaksanaan administrasi perizinan/pemberian rekomendasi;
- i. pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dan penyiapan perangkat hukum;
- j. penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- k. pelaksanaan pelayanan porporasi berkaitan dengan pemungutan pajak;
- l. pelaksanaan fasilitasi implementasi rencana tindak kota;
- m. penyusunan perumusan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- n. penyusunan perumusan baan penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota;

#### Pasal 195

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan perencanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyusunan perencanaan kegiatan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan perencanaan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Bidang Pendapatan Pajak Daerah

#### Pasal 196

Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang Pendapatan Pajak Daerah.

#### Pasal 197

Rincian tugas bidang Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, sebagai berikut :

- a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- b. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kota.

#### Pasal 198

(1) Seksi Pajak Hotel dan Restoran mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pajak Hiburan dan Reklame mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

#### Pasal 199

Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan.

#### Pasal 200

Rincian tugas Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, sebagai berikut :

- a. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan retribusi daerah;
- b. fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan retribusi daerah skala kota;
- d. pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota;
- e. pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota;
- f. usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK;
- g. penyiapan data realisasi penerima DBH kota.

#### Pasal 201

(1) Seksi Perimbangan Pajak mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknik di bidang perimbangan pajak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan pajak;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan pajak;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan pajak;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perimbangan Bukan Pajak mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan bukan pajak;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan bukan pajak;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pajak;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lain-lain pendapatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lain-lain pendapatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang lain-lain pendapatan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang lain-lain pendapatan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

#### Pasal 202

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang anggaran dan perbendaharaan.

#### Pasal 203

Rincian tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, sebagai berikut :

- a. penyusunan tata tertib bagan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD;
- b. perencanaan anggaranana penanganan urusan pemerintah kota;
- c. penyusunan perumusan bahan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;
- d. pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU kota;
- e. pengelolaan DAU kota;
- f. pengelolaan DAK.

#### Pasal 204

(1) Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran pendapatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran dan pendapatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang anggaran pendapatan;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran dan pendapatan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Anggaran Belanja mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran belanja;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran belanja;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di instansi lain di bidang anggaran belanja;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran belanja;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perbendaharaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 5

#### Bidang Kas dan Akuntansi

### Pasal 205

Bidang Kas dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang kas dan akuntansi.

### Pasal 206

Rincian tugas Bidang Kas dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, sebagai berikut :

- a. pelaporan keuangan DAU kota;
- b. pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK;
- c. pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH;
- d. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota;
- e. penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. penyusunan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama.

### Pasal 207

(1) Seksi Kas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kas;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di instansi lain di bidang kas;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kas;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kas;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang akuntansi;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang evaluasi dan pelaporan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara jabatan yang ada di kantor DPPK kota Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat
  - 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
  - 2. Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan.
- C. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
  - 1. Seksi Anggaran dan Pendapatan.
  - 2. Seksi Anggaran Belanja.
  - 3. Seksi Perbendaharaan.
- D. Bidang Pendapatan Pajak Daerah
  - 1. Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir.
  - 2. Seksi Pajak Hiburan dan Reklame.
  - 3. Seksi Pajak Hotel dan Restoran.
- E. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
  - 1. Seksi Perimbangan Pajak.
  - 2. Seksi Perimbangan Bukan Pajak.
  - 3. Seksi Lain-lain Pendapatan.
- F. Bidang Kas dan Akuntansi
  - 1. Seksi Kas.
  - 2. Seksi Akuntansi.
  - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- G. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- H. Sub Bagian Tata Usaha



## 2.3 Pembahasan

### 2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Surabaya tidak menerapkan akuntansi anggaran. Untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, informasi anggaran diambil dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem akuntansi pendapatan SKPD menerapkan kebijakan akuntansi yang menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda. Basis akrual menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam akun pendapatan- Laporan Operasional (LO), sedangkan basis kas digunakan untuk pertanggungjawaban penerimaan APBD yang disajikan dalam akun pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Di dalam Laporan Realisasi Anggaran terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerahnya yang bersumber dari potensi-potensi di daerahnya sendiri. Selain dari PAD, penerimaan daerah juga berasal dari pemerintah pusat. Namun, di masa otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah. PAD dapat dikatakan efektif apabila realisasi PAD hampir mendekati atau bahkan sesuai dengan target PAD. Berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi PAD tahun 2011-2014.

**Tabel 2.1**

#### **Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014**

PAD	2011		2012		2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Hasil Pajak Daerah	1.691.550.000.000	1.488.358.147.753	1.909.562.850.000	1.852.977.636.887	2.118.292.666.000	2.154.652.323.798	2.471.025.909.302	2.427.647.860.148
Hasil Retribusi Daerah	265.797.243.579	209.834.317.888	203.721.977.378	183.482.993.435	235.196.801.853	229.680.153.172	285.197.286.889	270.112.725.497
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	77.019.175.680	75.962.115.306	97.652.231.173	97.696.057.373	111.966.678.336	111.967.697.969	120.855.713.722	120.856.635.210
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	105.259.156.201	112.359.720.634	130.328.533.331	145.457.161.138	191.653.080.406	295.279.875.771	370.380.244.224	488.706.643.123
<b>Jumlah</b>	<b>2.139.625.575.460</b>	<b>1.886.514.301.581</b>	<b>2.341.265.681.882</b>	<b>2.279.613.848.833</b>	<b>2.657.109.226.595</b>	<b>2.791.580.050.710</b>	<b>3.247.459.154.137</b>	<b>3.307.323.863.978</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014

### 2.3.1.1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas PAD adalah suatu rasio untuk mengetahui seberapa efektif Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam merealisasikan penerimaan PAD terhadap penerimaan PAD yang telah dianggarkan Efektivitas PAD dapat diketahui melalui perhitungan persentase perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran PAD.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasilnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Efektivitas Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efektivitas
2011	2.139.625.575.460	1.886.514.301.581	88,17%
2012	2.341.265.681.882	2.279.613.848.833	97,37%
2013	2.657.109.226.595	2.791.580.050.710	105,06%
2014	3.247.459.154.137	3.307.323.863.978	101,84%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011- 2014

Klasifikasi Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- >100% = sangat efektif
- 90-100% = efektif
- 80%-90% = cukup efektif
- 60%-80% = kurang efektif
- <60% = tidak efektif

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Pada tahun 2011 anggaran PAD sebesar Rp 2.139.625.575.460 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp 1.886.514.301.581. Dengan begitu dapat dihitung rasio efektivitas sebesar 88,17%, dapat dikatakan bahwa PAD tahun 2011 cukup efektif.

Pada tahun 2012 anggaran PAD sebesar Rp 2.341.265.681.882 dan realisasinya sebesar Rp 2.279.613.848.833, rasio efektivitas sebesar 97,37%, pada tahun ini PAD dinyatakan efektif. Selanjutnya, untuk tahun 2013 dengan anggaran PAD sebesar Rp 2.657.109.226.595, dengan realisasi Rp 2.791.580.050.710, rasio efektivitas sebesar 105,06% dapat dikatakan bahwa PAD pada tahun 2013 adalah sangat efektif dengan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 8%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 target PAD sebesar Rp 3.247.459.154.137 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp 3.307.323.863.978, maka rasio efektivitas sebesar 101,84%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, tahun 2014 terjadi penurunan sekitar 4%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2014, namun pada tahun tersebut masih dikatakan sangat efektif. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Surabaya telah berupaya dalam meningkatkan efektivitas PAD yang terlihat pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.

### 2.3.2 Belanja Daerah

Pada Laporan Realisasi Anggaran juga terdapat Belanja Daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah periode 2011-2014 :

**Tabel 2.3**  
**Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014**

Belanja Daerah	2011		2012		2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	1.965.502.958.749	1.715.112.525.938	2.130.113.763.032	1.908.805.098.309	2.208.822.728.463	2.049.262.468.475	2.497.792.485.109	2.187.887.736.524
Belanja Barang dan Jasa	1.485.269.598.540	1.164.991.205.504	1.525.064.821.291	1.210.639.630.540	1.694.372.007.583	1.466.759.779.178	2.116.689.109.008	1.814.062.371.710
Belanja Bunga	7.102.500.000	2.903.307.374	5.646.336.544	2.223.619.192	1.226.354.437	0	0	0
Belanja Hibah	437.308.349.354	325.744.017.586	297.150.224.574	258.999.514.331	284.910.615.394	253.316.709.085	432.726.689.556	300.184.342.399
Belanja Bantuan Sosial	4.600.000.000	1.046.730.000	1.045.000.000	867.500.000	1.651.000.000	853.703.500	1.651.000.000	89.670.000
Belanja Bantuan Keuangan	1.900.000.000	644.213.000	1.900.000.000	644.208.000	1.900.000.000	604.305.000	2.070.314.000	787.920.000
Belanja Modal	1.280.228.524.330	543.111.645.989	1.182.671.510.989	912.716.142.120	1.747.356.759.354	1.281.394.616.149	2.010.585.827.631	1.404.366.425.421
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	156.768.500	10.000.000.000	3.054.510.589	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0
Belanja Bagi Hasil	3.190.280.754	0	4.673.174.229	1.200.000.000	5.088.082.959	5.088.082.959	1.200.000.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>5.195.102.211.727</b>	<b>3.753.710.413.891</b>	<b>5.158.264.830.659</b>	<b>4.299.150.223.081</b>	<b>5.955.327.548.190</b>	<b>5.057.279.664.345</b>	<b>7.072.715.425.304</b>	<b>5.707.378.466.054</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2014

### 2.3.2.1 Efektivitas Belanja Daerah

Efektivitas Belanja Daerah dapat diketahui melalui rasio untuk mengetahui seberapa efektif Dinas PPKD Kota Surabaya dalam merealisasikan Belanja Daerah terhadap anggaran Belanja Daerah. Efektivitas Belanja Daerah dapat diketahui melalui perhitungan presentase perbandingan antara realisasi Belanja Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah. Berikut formula yang digunakan untuk menghitung efektivitas Belanja Daerah.

$$\text{Efektivitas Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dan hasilnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Efektivitas Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efektivitas
2011	5.195.102.211.727	3.753.710.413.891	72,25%
2012	5.158.264.830.659	4.299.150.223.081	83,34%
2013	5.955.327.548.190	5.057.279.664.345	84,92%
2014	7.072.715.425.304	5.707.378.466.054	80,70%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2014

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2011 dengan anggaran yang mencapai Rp 5.195.102.211.727, realisasi belanja yang dicapai yaitu sebesar Rp 3.753.710.413.891, dengan demikian dapat diketahui bahwa rasio efektivitas belanja 72,25% yaitu kurang efektif. Pada tahun 2012, angka anggaran belanja menurun menjadi Rp 5.158.264.830.659 dan realisasi belanjanya Rp 4.299.150.223.081, rasio efektivitas dinilai cukup efektif yaitu sebesar 83,34%. Pada tahun 2013, anggaran belanja naik menjadi Rp 5.955.327.548.190 dan realisasi belanja sebesar Rp 5.057.279.664.345 maka rasio efektivitasnya sebesar 84,92%, pada tahun ini dikatakan cukup efektif.



Pada tahun 2013, anggaran belanja naik menjadi Rp 5.955.327.548.190 dan realisasi belanja sebesar Rp 5.057.279.664.345 maka rasio efektivitasnya sebesar 84,92%, pada tahun ini dikatakan cukup efektif. Pada tahun 2014, terjadi kenaikan anggaran yang cukup pesat sebesar Rp 7.072.715.425.304, realisasi Rp 5.707.378.466.054 dengan rasio efektivitas sebesar 80,70%. Kenaikan anggaran tersebut dikarenakan peningkatan anggaran pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang signifikan.

### 2.3.3 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya

Salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD untuk membiayai belanja daerahnya sendiri. Untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara :

$$\text{Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah kota Surabaya periode 2011-2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**

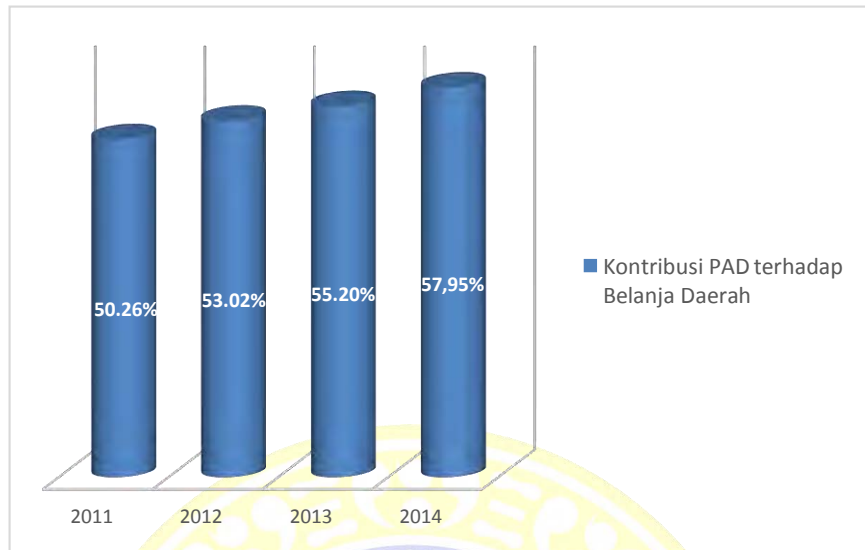
#### **Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya**

Tahun	PAD (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Kontribusi PAD terhadap BD
2011	1.886.514.301.581	3.753.710.413.891	50,26%
2012	2.279.613.848.833	4.299.150.223.081	53,02%
2013	2.791.580.050.710	5.057.279.664.345	55,20%
2014	3.307.323.863.978	5.707.378.466.054	57,95%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2014



**Gambar 2.2**  
**Grafik Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya**



Sumber : Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2014

#### Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

0% - 10% = Sangat Kurang

10% - 20% = Kurang

20% - 30% = Sedang

30% - 40% = Cukup Baik

40% - 50% = Baik

>50% = Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PAD yang diperoleh tiap tahunnya mengalami kenaikan, begitu pula dengan Belanja Daerah yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Sehingga kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah periode 2011-2014 terus mengalami peningkatan, dengan rasio yang telah dihitung sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa PAD sudah sangat baik dalam memenuhi seluruh kebutuhan Belanja Daerahnya yang terlihat dari persentase kontribusi PAD terhadap BD menunjukkan >50%.

Namun, masih mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus juga bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah yang dapat berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dan bagi hasil lainnya.

### 2.3.4 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi

Selain itu, untuk menilai apakah kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya dikatakan sudah bagus atau tidaknya, diperlukan hasil kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dari kota atau kabupaten lain sebagai pembanding kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. Pemilihan kabupaten Banyuwangi karena dinilai sebagai kabupaten yang berada dalam masa perkembangan pembangunan daerahnya, terlebih dalam sektor pariwisata. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2011-2014 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

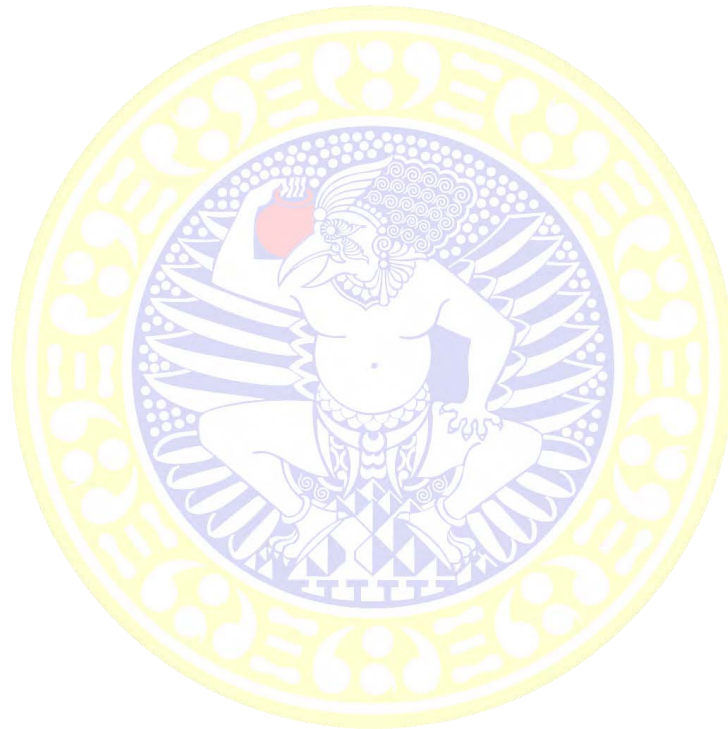
#### **Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Belanja Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi PAD terhadap BD</b>
2011	113.364.553.470	1.442.970.170.072	7,85%
2012	139.514.584.000	1.680.895.444.056	8,30%
2013	183.235.877.422	1.885.285.267.003	9,72%
2014	283.488.703.181	2.296.136.155.708	12,35%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa PAD dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam periode 2011-2014 menunjukkan peningkatan. Namun, jika dikaitkan dengan seberapa besar kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi ternyata menunjukkan kontribusi yang kurang baik. Terlihat pada tahun 2011 dan 2013 dengan persentase dibawah 10% yang dikatakan sangat kurang dalam berkontribusi terhadap Belanja Daerah.

Pada tahun 2014 persentase kontribusi sebesar  $>10\%$  dapat dikatakan kurang dalam berkontribusi dalam Belanja Daerah, dan secara keseluruhan kontribusi PAD terhadap Belanja Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan yang dapat dikatakan bahwa Kabupaten Banyuwangi terus mengupayakan optimalisasi dan perkembangan di Pendapatan Asli Daerahnya untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Daerah



## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

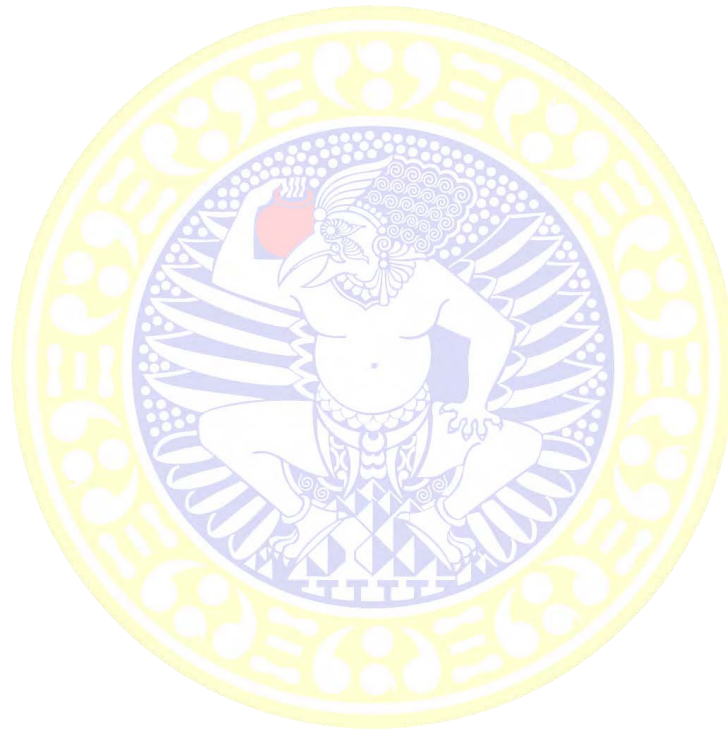
1. Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah menetapkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap bidangnya.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan di setiap bidang untuk kegiatan menjadi efektif.
3. Realisasi anggaran sudah sesuai dengan apa yang telah dilaporkan kepada pemerintah sebagaimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebagai lembaga sektor publik.
4. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi, kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dalam empat tahun yang dianalisis, dinilai sangat baik dalam membiayai kebutuhan Belanja Daerahnya dan dari tahun ke tahun telah menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya semakin meningkatkan upayanya dalam pemenuhan kebutuhan Belanja Daerah.

#### **3.2 Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yaitu :

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengembangkan sumber-sumber pokok penerimaan PAD yang diharapkan mampu meningkatkan keuangan daerah.

3. Salah satu cara dalam meningkatkan otonomi daerah yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yaitu dengan cara mempromosikan potensi-potensi yang ada di Surabaya kepada investor.




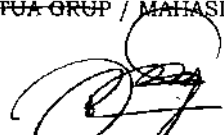


## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga. Edisi ketiga.
- Departemen Dalam Negeri. 1997. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327.1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi kesatu. Jakarta : Salemba Empat.
- <http://dppksurabaya.id/> Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Data diunduh pada tanggal 10 Mei 2016. 09:24.
- <http://pekikdaerah.wordpress.com/> Pusat Kajian dan Informasi Keuangan Daerah/ Data diunduh pada tanggal 15 Juni 12:27.
- <http://landasanteori.com/2015/07/pengertian-pendapatan-asli-daerah-dan.html/> Data diunduh pada tanggal 15 Juni 2016. 15:45.
- <http://sayanda.com/otonomi-daerah/>. Data diunduh pada tanggal 15 Juni 2016.16:00.
- <http://dppksby.com/> Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Data diunduh pada tanggal 14 Mei 2016. 14:27.
- <http://banyuwangikab.bps.go.id/> Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014. Data diunduh pada tanggal 16 Juni 2016. 03.10.
- Kota Surabaya. 2011. *Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya*.
- Rahman, Herlina. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah*.
- , 1999. *Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- , 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 104 tentang Dana Perimbangan*.
- , 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 110 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- , 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

- , 2004. *Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.*
- , 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Definisi Otonomi Daerah.*
- , 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.*
- , 2005. *Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- , 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran.*
- Riwu Kaho, Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Utomo, Warsito. 2001. *Peranan dan Strategi PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.*
- Widjaja, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia , Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.* Edisi kesatu cetakan kedua. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

**PKL PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI  
SEMESTER GASAL / GENAP 20 ...s/d 20 ...**

NAMA MAHASISWA	:	EKKA KURNIA SARI
NIM	:	091310113064
ALAMAT	:	JL. KUTISARI SELATAN 59, SBY
JUMLAH SKS KUMULATIF	:	100
IP KUMULATIF	:	2,96
TOPIK PKL BIDANG ( LINGKARI SALAH SATU )	:	1 1 AKUNTANSI KEUANGAN 2 AKUNTANSI BIAYA/MANAJEMEN 3 AUDITING 4 SISTEM AKUNTANSI 5 PERPAJAKAN 6 <b>AKUNTANSI PEMERINTAHAN</b> 7 LAIN-LAIN
NAMA KEL / GRUP PKL	:	1 INTAN KURNIA IRRAWATI 2 EKKA KURNIA SARI 3 BHRELIAN NARENDRO PUTRI 4 ..... 5 ..... 6 .....
OBYEK PKL / PERUSAHAAN TEMPAT PKL	:	KANTOR PEMERINTAH KOTA SURABAYA
ALAMAT OBYEK PKL	:	JL. JIMERTO NO. 25-27 SURABAYA
DOSEN PEMBIMBING PKL	:	BH WULANDARI (FITRI)
JUDUL	:	ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN AGLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERIODE 2011-2014
MENYETUJUI / MENGETAHUI :		SURABAYA, 11, MARET, 2016.
DOSEN PEMBIMBING,		KETUA GRUP / MAHASISWA YBS
		
( AMALIA RIZKI, SE, MSI, AK CA		( EKKA KURNIA SARI
NIP. 197609122003122003		NIM. 091310113064



# UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI

Kampus B Jl. Sri Ikana 65 Surabaya 60286 Telp. 031-5033869, 5053156, Faks. 031-5053156

## DAFTAR PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Lokasi : Kantor DPPK kota Surabaya. Jl. Jimerto no. 25-27 Surabaya  
Waktu: Tanggal 22 Februari 2016 s.d 31 Maret 2016

No.	NIM – Nama Mahasiswa	Nilai Absolut	Nilai Relatif
1.	041310113064 – Ekka Kurnia Sari	74,99	AB

**Keterangan :** Materi Penilaian ini sudah mencakup Penilaian Materi PKL, Kedisiplinan, dan Penilaian lain – Lain

Acuan Penilaian :	Nilai Absolut	Nilai Relatif
	≥ 75	A
	70 – 74,99	AB
	65 – 69,99	B
	60 – 64,99	BC
	55 – 59,99	C
	40 – 54,99	D
	< 40	E

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing PKL

Surabaya, 25 Mei 2016  
Pemerintah Kota Surabaya  
Dinas PPKD kota Surabaya  
Bidang Kas dan Akuntansi  
Yang menilai,

Wulandari Fitri Ekasari, S. Ak., M. Sc., Ak., CFP



\* Mohon dimasukkan ke dalam amplop yang ditujukan ke dosen Pembimbing



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
Jl. Jimerto no. 25 – 27 Surabaya Telp. 5312144 ext. 345, 584 Fax. 5342008

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 1010 /436.6.13/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNIARTO HERLAMBANG, S.Si, M.Si**

NIP : 19730626 199901 1 001

Pangkat/ Gol.: Pembina/ IVa

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor : 070/1355/436.7.3/2016 tanggal 5 Februari 2016, perihal Praktek Kerja Lapangan, menerangkan bahwa :

**Nama : Ekka Kurnia Sari**

**Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya**

**NIM : 041310113064**

Telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tentang **Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Periode 2011-2014**, mulai tanggal 22 Februari 2016 sampai tanggal 31 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Mei 2016

Kepala Dinas  
Sekretaris



**YUNIARTO HERLAMBANG, S.Si, M.Si**  
Pembina

NIP. 19730626 199901 1 001



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	1.691.550.000,00	1.488.358.147,27	(203.191.852,73)
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	265.797.243,579,00	209.834.317,887,85	(55.962.925,691,15)
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	77.019.175,680,00	75.962.115,305,92	(1.057.060,374,08)
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	105.259.156,201,00	112.359.720,673,68	7.100.564,472,68
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.139.625.575,460,00</b>	<b>1.886.514.301,580,72</b>	<b>(253.111.273,879,28)</b>
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	221.518.180,068,00	225.590.330,815,00	4.072.150,747,00
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	5.599.253,058,00	8.692.232,539,00	3.092.979,481,00
1.2.1.3	Dana alokasi umum	679.450.127,000,00	679.262.759,000,00	(187.368,000,00)
1.2.1.4	Dana alokasi khusus	66.499.500,000,00	49.874.625,000,00	(16.624.875,000,00)
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>973.067.060,126,00</b>	<b>963.419.947,354,00</b>	<b>(9.647.112.772,00)</b>
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
1.2.2.1	Dana otonomi khusus	-	-	-
1.2.2.2	Dana penyesuaian	356.905,561,800,00	386.951,310,320,00	30.045.748,520,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>356.905,561,800,00</b>	<b>386.951,310,320,00</b>	<b>30.045.748,520,00</b>
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi			
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	484.013,627,911,00	509.508,087,368,00	25.494,459,457,00
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya	2.679,579,028,00	1.551,780,688,00	(1.127,798,340,00)
1.2.3.3	Bantuan Keuangan Prop. Lainnya	15,397,200,000,00	10,364,000,000,00	(5,033,200,000,00)
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi</b>	<b>502.090,406,939,00</b>	<b>521,423,868,056,00</b>	<b>19,333,461,117,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>1.832,063,028,865,00</b>	<b>1,871,795,125,730,00</b>	<b>39,732,096,865,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>			
1.3.1	Pendapatan hibah	-	600,000,000,00	600,000,000,00
1.3.2	Pendapatan dana darurat	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	-	-	-

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1.3.7	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	125.000.000,00	125.000.000,00
	<b>Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	-	<b>725.000.000,00</b>	<b>725.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.971.698.604.325,00</b>	<b>3.759.034.427.310,72</b>	<b>(212.654.177.014,28)</b>
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>			
2.1.1	Belanja pegawai	1.965.502.958.749,00	1.715.112.525.938,00	(250.390.432.811,00)
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.485.269.598.540,00	1.164.991.205.503,80	(320.278.393.036,20)
2.1.3	Belanja bunga	7.102.500.000,00	2.903.307.374,00	(4.199.192.626,00)
2.1.4	Belanja subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	437.308.349.354,00	325.744.017.586,00	(111.564.331.768,00)
2.1.6	Belanja bantuan sosial	4.600.000.000,00	1.046.730.000,00	(3.553.270.000,00)
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	1.900.000.000,00	644.213.000,00	(1.255.787.000,00)
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3.901.683.406.643,00</b>	<b>3.210.441.999.401,80</b>	<b>(691.241.407.241,20)</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.2.1	Belanja tanah	203.820.211.512,00	100.486.009.000,00	(103.334.202.512,00)
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	285.639.571.828,00	179.104.771.991,00	(106.534.799.837,00)
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	384.073.604.300,00	157.938.496.455,00	(226.135.107.845,00)
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	389.506.730.552,00	102.454.759.850,00	(287.051.970.702,00)
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	14.841.975.060,00	1.602.454.313,00	(13.239.520.747,00)
2.2.6	Belanja aset lainnya	2.346.431.078,00	1.525.154.380,00	(821.276.698,00)
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.280.228.524.330,00</b>	<b>543.111.645.989,00</b>	<b>(737.116.878.341,00)</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>			
2.3.1	Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00	156.768.500,00	(9.843.231.500,00)
	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>156.768.500,00</b>	<b>(9.843.231.500,00)</b>
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>			
2.4.1	Transfer bagi hasil			
2.4.1.1	Bagi hasil pajak	-	-	-
2.4.1.2	Bagi hasil retribusi	3.190.280.754,00	-	(3.190.280.754,00)
2.4.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>3.190.280.754,00</b>	-	<b>(3.190.280.754,00)</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.195.102.211.727,00</b>	<b>3.753.710.413.890,80</b>	<b>(1.441.391.797.836,20)</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(1.223.413.607.402,00)</b>	<b>5.324.013.419,92</b>	<b>1.228.737.620.821,92</b>
<b>3</b>	<b>Pembayaran</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>			
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	1.234.413.607.402,00	505.770.166.765,28	(728.643.440.636,72)

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Koda	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	2.865.831.392,07	2.865.831.392,07
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>1.234.413.607.402,00</b>	<b>508.635.998.157,35</b>	<b>(725.777.609.244,65)</b>
3.2	<b>Pengeluaran Daerah</b>			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-
3.1.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	-	-	-
3.1.2	Pembayaran utang pokok	11.000.000.000,00	10.960.748.326,00	(39.251.674,00)
3.1.3	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>10.960.748.326,00</b>	<b>(39.251.674,00)</b>
	<b>Pembayaran Netto</b>	<b>1.223.413.607.402,00</b>	<b>497.675.249.831,35</b>	<b>(725.738.357.570,65)</b>
3.3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	-	502.999.263.251,27	502.999.263.251,27
	<b>Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	-	<b>502.999.263.251,27</b>	<b>502.999.263.251,27</b>

SILPA : PEMKOT Rp. 481.255.833.664,66  
 BLUD Rp. 21.743.429.586,61

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
S/D. BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2012

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	1.909.562.850.000,00	1.852.977.636.886,55	(56.585.213.113,45)
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	203.721.977.378,00	183.482.993.434,78	(20.238.983.943,22)
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	97.652.321.173,00	97.696.057.372,81	43.736.199,81
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	130.328.533.331,00	145.457.161.138,47	15.128.627.807,47
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.341.265.681.882,00</b>	<b>2.279.613.848.832,61</b>	<b>(61.651.833.049,39)</b>
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	283.859.542.304,00	299.746.830.080,00	15.887.287.776,00
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	10.784.302.628,00	18.467.773.817,00	7.683.471.189,00
1.2.1.3	Dana alokasi umum	1.061.625.528.000,00	1.061.625.528.000,00	-
1.2.1.4	Dana alokasi khusus	53.227.560.000,00	53.227.560.000,00	-
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.409.496.932.932,00</b>	<b>1.433.067.691.897,00</b>	<b>23.570.758.965,00</b>
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
1.2.2.1	Dana otonomi khusus	-	-	-
1.2.2.2	Dana penyesuaian	309.819.125.000,00	309.819.125.000,00	-
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>309.819.125.000,00</b>	<b>309.819.125.000,00</b>	<b>-</b>
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi			
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	607.033.790.222,00	594.448.090.669,00	(12.585.699.553,00)
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya	2.679.579.028,00	558.714.255,00	(2.120.864.773,00)
1.2.3.3	Bantuan Keuangan Prop. Lainnya	23.066.440.000,00	16.777.000.000,00	(6.289.440.000,00)
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi</b>	<b>632.779.809.250,00</b>	<b>611.793.804.924,00</b>	<b>(20.986.004.326,00)</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>2.352.095.867.182,00</b>	<b>2.354.670.621.821,00</b>	<b>2.574.754.639,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>			
1.3.1	Pendapatan hibah	-	-	-
1.3.2	Pendapatan dana darurat	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	-	-	-

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1.3.7	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	17.468.000,00	17.468.000,00
	<b>Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	-	<b>17.468.000,00</b>	<b>17.468.000,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.693.361.549.064,00</b>	<b>4.634.301.938.653,61</b>	<b>(59.059.610.410,39)</b>
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>			
2.1.1	Belanja pegawai	2.130.113.763.032,00	1.908.805.098.308,58	(221.308.664.723,42)
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.525.064.821.291,00	1.210.639.630.539,86	(314.425.190.751,14)
2.1.3	Belanja bunga	5.646.336.544,00	2.223.619.192,00	(3.422.717.352,00)
2.1.4	Belanja subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	297.150.224.574,00	258.999.514.331,19	(38.150.710.242,81)
2.1.6	Belanja bantuan sosial	1.045.000.000,00	867.500.000,00	(177.500.000,00)
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	1.900.000.000,00	644.208.000,00	(1.255.792.000,00)
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3.960.920.145.441,00</b>	<b>3.382.179.578.371,63</b>	<b>(578.740.575.069,37)</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.2.1	Belanja tanah	206.004.210.461,00	136.872.202.550,00	(69.132.007.911,00)
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	355.177.065.651,00	282.966.010.775,00	(72.211.054.876,00)
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	338.972.036.272,00	268.319.373.162,00	(70.652.663.110,00)
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	267.816.802.805,00	211.703.906.887,00	(56.112.895.918,00)
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	13.721.705.550,00	11.965.688.300,00	(1.756.017.250,00)
2.2.6	Belanja aset lainnya	979.690.250,00	888.960.446,00	(90.729.804,00)
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.182.671.510.989,00</b>	<b>912.716.142.120,00</b>	<b>(269.955.368.869,00)</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>			
2.3.1	Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00	3.054.510.589,00	(6.945.489.411,00)
	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>3.054.510.589,00</b>	<b>(6.945.489.411,00)</b>
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>			
2.4.1	Transfer bagi hasil			
2.4.1.1	Bagi hasil pajak	-	-	-
2.4.1.2	Bagi hasil retribusi	4.673.174.229,00	1.200.000.000,00	(3.473.174.229,00)
2.4.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>4.673.174.229,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>(3.473.174.229,00)</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.158.264.830.639,00</b>	<b>4.299.150.223.080,63</b>	<b>(859.114.607.578,37)</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(464.903.281.595,00)</b>	<b>335.151.715.572,98</b>	<b>800.054.997.167,98</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>			
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	502.999.263.250,00	502.999.263.251,27	1,27



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
3.1.2	Pencarian dana cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	150.659.092,00	150.659.092,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>502.999.263.250,00</b>	<b>503.149.922.343,27</b>	<b>150.659.093,27</b>
3.2	<b>Pengeluaran Daerah</b>			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-
3.2.1.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	5.174.485.000,00	-	(5.174.485.000,00)
3.2.1.2	Pembayaran utang pokok	32.921.496.655,00	32.882.244.978,00	(39.251.677,00)
3.2.1.3	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	<b>38.095.981.655,00</b>	<b>32.882.244.978,00</b>	<b>(5.213.736.677,00)</b>
	<b>Pembayaran Netto</b>	<b>464.903.281.595,00</b>	<b>470.267.677.363,27</b>	<b>5.364.395.770,27</b>
3.3	<b>Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)</b>	-	<b>805.419.392.938,25</b>	<b>805.419.392.938,25</b>
	<b>Jumlah Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>805.419.392.938,25</b>	<b>805.419.392.938,25</b>

SILPA : PEMKOT Rp. 772.572.176.046,45  
 BLUD Rp. 32.847.216.891,80

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

**TRI RISMAHARINI**

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
S/D. BULAN DESEMBER 2013

Kode	Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	2.118.292.666.000,00	2.154.652.323.797,88	101,72	1.852.977.636.886,55
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	235.196.801.853,00	229.680.153.171,85	97,65	183.482.993.434,78
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	111.966.678.336,00	111.967.697.968,77	100,00	97.696.057.372,81
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	191.653.080.406,00	295.279.875.771,01	154,07	145.457.161.138,47
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.657.109.226.595,00</b>	<b>2.791.580.050.709,51</b>	<b>105,06</b>	<b>2.279.613.848.832,61</b>
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	325.840.995.606,00	255.690.446.250,00	78,47	299.746.830.080,00
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	13.002.385.240,00	15.247.050.379,00	117,26	18.467.773.817,00
1.2.1.3	Dana alokasi umum	1.160.025.693.000,00	1.160.025.693.000,00	100,00	1.061.625.528.000,00
1.2.1.4	Dana alokasi khusus	68.180.790.000,00	29.928.308.000,00	43,90	53.227.560.000,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.567.049.863.846,00</b>	<b>1.460.891.497.629,00</b>	<b>93,23</b>	<b>1.433.067.891.897,00</b>
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
1.2.2.1	Dana otonomi khusus	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana penyesuaian	359.911.885.000,00	360.003.798.000,66	100,03	309.819.125.000,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>359.911.885.000,00</b>	<b>360.003.798.000,66</b>	<b>100,03</b>	<b>309.819.125.000,00</b>
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi				
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	664.150.585.652,00	613.629.385.380,00	92,39	594.448.090.669,00
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya	757.294.351,00	950.910.195,00	125,57	558.714.255,00
1.2.3.3	Bantuan Keuangan Prop. Lainnya	6.173.385.000,00	8.238.075.000,00	133,45	16.777.000.000,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi</b>	<b>671.081.265.003,00</b>	<b>622.818.370.575,00</b>	<b>92,81</b>	<b>611.783.804.924,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>2.598.043.013.849,00</b>	<b>2.443.713.666.204,66</b>	<b>94,06</b>	<b>2.354.670.821.821,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>				
1.3.1	Pendapatan hibah	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	-	-	-	-

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode	Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
1	2	3	4	5	6
1.3.7	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.913.000,00	-	-	17.468.000,00
	<b>Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>91.913.000,00</b>	-	-	<b>17.468.000,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.255.244.153.444,00</b>	<b>5.235.293.716.914,17</b>	<b>99,62</b>	<b>4.634.301.938.653,61</b>
<b>2</b>	<b>Belanja</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
2.1.1	Belanja pegawai	2.208.822.728.463,00	2.049.262.468.474,52	92,78	1.908.805.098.308,58
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.694.372.007.583,00	1.466.759.779.177,53	86,57	1.210.639.630.539,86
2.1.3	Belanja bunga	1.226.354.437,00	-	-	2.223.619.192,00
2.1.4	Belanja subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	284.910.615.394,00	253.316.709.084,84	88,91	258.999.514.331,19
2.1.6	Belanja bantuan sosial	1.651.000.000,00	853.703.500,00	51,71	867.500.000,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	1.900.000.000,00	604.305.000,00	31,81	644.208.000,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>4.192.882.705.877,00</b>	<b>3.770.796.965.236,89</b>	<b>89,93</b>	<b>3.382.179.576.371,63</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>				
2.2.1	Belanja tanah	309.714.099.809,00	238.158.399.925,00	76,90	136.872.202.550,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	264.793.778.831,00	205.038.395.845,00	77,43	282.966.010.775,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	502.131.712.829,00	372.679.990.044,33	74,22	268.319.373.162,00
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	668.911.732.364,00	464.140.371.614,73	69,39	211.703.906.887,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	712.112.145,00	449.432.800,00	63,11	11.965.688.300,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	1.093.323.376,00	948.026.920,00	86,71	888.960.446,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.747.356.759.354,00</b>	<b>1.281.394.616.149,06</b>	<b>73,33</b>	<b>912.716.142.120,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>				
2.3.1	Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00	-	-	3.054.510.589,00
	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	-	-	<b>3.054.510.589,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>				
2.4.1	Transfer bagi hasil				
2.4.1.1	Bagi hasil pajak	-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi hasil retribusi	5.088.082.959,00	5.088.082.959,00	100,00	1.200.000.000,00
2.4.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya	-	-	-	-
	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>5.088.082.959,00</b>	<b>5.088.082.959,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.955.327.548.190,00</b>	<b>5.057.279.664.344,95</b>	<b>84,92</b>	<b>4.299.150.223.080,63</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(700.083.394.746,00)</b>	<b>178.014.052.569,22</b>	<b>(25,43)</b>	<b>395.151.715.572,98</b>
<b>3</b>	<b>Pembayaran</b>				
<b>3.1</b>	<b>Pemeriksaan Daerah</b>				
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (STLPA)	805.419.392.938,25	805.419.392.938,25	100,00	502.999.263.251,27

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode	Orsian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
1	2	3	4	5	6
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	104.194.238,00	-	150.659.292,00
3.1.6	Penerimaan utang daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>805.419.392.938,25</b>	<b>805.529.287.176,25</b>	<b>100,81</b>	<b>593.149.912.343,27</b>
3.2	Pengeluaran Daerah				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	19.972.668.470,00	6.448.485.000,00	33,99	-
3.2.3	Pembayaran utang pokok	10.238.900,00	-	-	32.882.244.978,00
3.2.4	Pembayaran pinjaman daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	<b>18.982.907.370,00</b>	<b>6.448.485.000,00</b>	<b>33,97</b>	<b>32.882.244.978,00</b>
	<b>Pembayaran Neto</b>	<b>786.436.485.568,25</b>	<b>799.075.102.176,25</b>	<b>101,61</b>	<b>470.267.677.365,27</b>
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)	86.353.090.822,00	977.089.154.745,47	1.131,50	805.419.392.938,25
	<b>Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)</b>	<b>86.353.090.822,00</b>	<b>977.089.154.745,47</b>	<b>1.131,50</b>	<b>805.419.392.938,25</b>

SLPA : PEMKOT Rp. 943.185.351.352,78  
 BLUD Rp. 33.903.803.392,69

Surabaya,  
 WALIKOTA SURABAYA

**TRI RISMAHARINI**



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**S/D. BULAN DESEMBER 2014**

Kode	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	2.471.025.909.302,00	2.427.647.860.148,15	98,24	2.154.652.323.797,88
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	285.197.286.889,00	270.112.725.497,14	94,71	229.680.153.171,85
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	120.855.713.722,00	120.856.635.210,40	100,00	111.967.697.968,77
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	370.380.244.224,00	488.706.643.122,78	131,95	295.279.875.771,01
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.247.459.154.137,00</b>	<b>3.307.323.863.978,47</b>	<b>101,84</b>	<b>2.791.580.050.709,51</b>
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	317.816.601.094,40	246.211.550.026,00	77,47	255.690.446.250,00
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	13.002.385.240,00	21.419.313.519,00	164,73	15.247.050.379,00
1.2.1.3	Dana alokasi umum	1.200.889.359.000,00	1.200.889.359.000,00	100,00	1.160.025.693.000,00
1.2.1.4	Dana alokasi khusus	66.182.230.000,00	19.854.669.000,00	30,00	29.928.308.000,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.597.890.575.334,40</b>	<b>1.488.374.891.545,00</b>	<b>93,15</b>	<b>1.460.891.497.629,00</b>
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
1.2.2.1	Dana otonomi khusus	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana penyesuaian	448.297.975.000,40	448.340.154.000,00	100,01	360.003.798.000,66
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>448.297.975.000,40</b>	<b>448.340.154.000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>360.003.798.000,66</b>
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi				
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	823.489.838.067,00	779.576.048.153,00	94,67	613.629.385.380,00
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya	2.360.319.364,00	2.360.319.363,00	100,00	950.910.195,00
1.2.3.3	Bantuan Keuangan Prop. Lainnya	7.067.090.000,00	2.836.580.000,00	40,14	8.238.075.000,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi</b>	<b>832.917.247.431,00</b>	<b>784.772.947.516,00</b>	<b>94,22</b>	<b>622.818.370.575,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>2.879.105.797.765,80</b>	<b>2.721.487.993.061,00</b>	<b>94,53</b>	<b>2.443.713.666.204,66</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>				
1.3.1	Pendapatan hibah	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	-	-	-	-



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
1	2	3	4	5	6
1.3.7	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.629.261.000,00	23.629.261.000,00	100,00	-
	<b>Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>23.629.261.000,00</b>	<b>23.629.261.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6.150.194.212.902,80</b>	<b>6.052.441.118.039,47</b>	<b>98,41</b>	<b>5.235.293.716.914,17</b>
<b>2</b>	<b>Belanja</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
2.1.1	Belanja pegawai	2.497.792.485.109,00	2.187.887.736.524,00	87,59	2.049.262.468.474,52
2.1.2	Belanja barang dan jasa	2.116.689.109.008,00	1.814.062.371.710,00	85,70	1.466.759.779.177,53
2.1.3	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	432.726.689.556,00	300.184.342.399,09	69,37	253.316.709.084,84
2.1.6	Belanja bantuan sosial	1.651.000.000,00	89.670.000,00	5,43	853.703.500,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	2.070.314.000,00	787.920.000,00	38,06	604.305.000,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>5.030.929.397.673,00</b>	<b>4.303.012.040.633,09</b>	<b>85,19</b>	<b>3.770.796.965.236,89</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>				
2.2.1	Belanja tanah	364.481.478.617,00	187.840.393.447,00	51,54	238.158.398.925,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	307.847.050.136,00	280.948.288.646,00	91,26	205.018.395.845,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	490.763.424.505,00	408.302.726.466,00	83,20	372.679.990.044,33
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	832.323.903.854,00	516.795.444.056,00	62,09	464.140.371.614,73
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	14.323.983.069,00	9.645.662.806,00	67,34	449.432.800,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	845.987.450,00	833.910.000,00	98,57	948.026.920,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>2.010.585.827.631,00</b>	<b>1.404.366.425.421,00</b>	<b>69,85</b>	<b>1.281.394.616.149,06</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>				
2.3.1	Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>				
2.4.1	Transfer bagi hasil				
2.4.1.1	Bagi hasil pajak	-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi hasil retribusi	1.200.000.000,00	-	-	5.088.082.959,00
2.4.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya	-	-	-	-
	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.088.082.959,00</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.072.715.425.304,00</b>	<b>5.707.378.466.054,09</b>	<b>80,70</b>	<b>5.057.279.664.344,95</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(922.521.212.401,20)</b>	<b>345.062.651.985,38</b>	<b>(37,40)</b>	<b>178.014.052.569,22</b>
<b>3</b>	<b>Pembayaran</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>				
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SLIPA)	943.185.351.353,40	977.089.154.745,47	103,59	805.419.392.938,25

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
1	2	3	4	5	6
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	29.733.336,00	-	104.194.238,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>943.185.351.353,40</b>	<b>977.118.888.081,47</b>	<b>103,60</b>	<b>805.523.587.176,25</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.1.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	20.664.138.951,60	10.637.000.000,00	51,48	6.448.485.000,00
3.1.2	Pembayaran utang pokok	-	-	-	-
3.1.3	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	<b>20.664.138.951,60</b>	<b>10.637.000.000,00</b>	<b>51,48</b>	<b>6.448.485.000,00</b>
	<b>Pembayaran Netto</b>	<b>922.521.212.401,80</b>	<b>966.481.888.081,47</b>	<b>104,77</b>	<b>799.075.102.176,25</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	-	<b>1.311.544.540.066,85</b>	-	<b>977.089.154.745,47</b>
	<b>Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	-	<b>1.311.544.540.066,85</b>	-	<b>977.089.154.745,47</b>

SILPA : PEMKOT Rp. 1.204.986.173.105,00  
 BLUD Rp. 92.413.827.517,85  
 KAPITASI Rp. 14.144.539.444,00

Surabaya,  
 WALIKOTA SURABAYA

**TRI RISMAHARINI**

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 Nomor : 7 Tahun 2012  
 Tanggal : 10 Juli 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

HAL: 1 / 2

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)		
		Anggaran 2011	Realisasi 2011	%
1	<b>PENDAPATAN</b>			
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
3	Pendapatan Pajak Daerah	28.308.388.600,00	32.449.080.866,10	114,63
4	Pendapatan Retribusi Daerah	21.907.957.926,00	21.621.743.609,84	98,69
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.998.335.503,89	9.983.335.503,89	83,21
6	Lain-Lain PAD yang sah	43.909.365.732,72	49.310.393.490,04	112,30
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>106.124.047.762,61</b>	<b>113.364.553.469,67</b>	<b>106,82</b>
8				
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>			
11	Dana bagi hasil Pajak	55.347.763.249,00	66.091.527.936,00	119,41
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.817.133.772,00	18.863.553.181,00	112,17
13	Dana Alokasi Umum	815.156.284.000,00	815.156.279.000,00	100,00
14	Dana Alokasi Khusus	81.911.900.000,00	81.911.900.000,00	100,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>969.233.081.021,00</b>	<b>982.023.260.117,00</b>	<b>101,32</b>
16				
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>			
18	Dana Otonomi Khusus	93.991.678.000,00	51.289.802.942,00	54,57
19	Dana Penyesuaian	138.194.821.920,00	180.690.663.920,00	130,75
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>232.186.499.920,00</b>	<b>231.980.466.862,00</b>	<b>99,91</b>
21				
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>			
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.900.255.551,00	87.622.916.704,00	135,01
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	0,00	0,00	0,00
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>64.900.255.551,00</b>	<b>87.622.916.704,00</b>	<b>135,01</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 +25)</b>	<b>1.266.319.836.492,00</b>	<b>1.301.626.643.663,00</b>	<b>102,79</b>
27				
28	<b>LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>			
29	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	37.185.649.700,00	35.329.674.926,00	95,01
32	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>37.185.649.700,00</b>	<b>35.329.674.926,00</b>	<b>95,01</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>1.409.629.533.954,61</b>	<b>1.450.320.872.078,67</b>	<b>102,89</b>
34				
35	<b>BELANJA</b>			
36	<b>BELANJA OPERASI</b>			
37	Belanja Pegawai	894.107.827.999,00	820.555.147.251,25	91,77
38	Belanja Barang	222.759.009.391,16	206.129.849.887,06	92,53
39	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Hibah	57.645.978.500,00	51.989.911.826,00	90,19
42	Belanja Bantuan Sosial	80.135.922.952,00	64.718.188.229,88	80,76
43	Belanja Bantuan Keuangan	48.757.366.000,00	47.127.607.840,00	96,66
44	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 43)</b>	<b>1.303.406.104.842,16</b>	<b>1.190.520.704.834,19</b>	<b>91,34</b>
45				
46	<b>BELANJA MODAL</b>			
47	Belanja Tanah	5.720.250.000,00	1.829.468.000,00	31,98
48	Belanja Peralatan dan Mesin	89.489.070.721,00	56.147.068.422,20	62,76
49	Belanja Gedung dan Bangunan	66.876.957.250,00	49.938.783.476,00	74,67
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.530.375.879,00	139.863.428.765,00	96,11
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.704.660.000,00	3.068.466.574,80	20,87
52	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
53	<b>Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)</b>	<b>322.301.313.850,00</b>	<b>250.847.215.238,00</b>	<b>77,83</b>
54				
55	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>			
56	Belanja Tak Terduga	5.500.000.000,00	1.602.250.000,00	29,13
57	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (56)</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>1.602.250.000,00</b>	<b>29,13</b>
58	<b>JUMLAH BELANJA (44 + 53+ 57)</b>	<b>1.631.207.418.692,16</b>	<b>1.442.970.170.072,19</b>	<b>88,46</b>
59				
60	<b>TRANSFER</b>			
61	<b>TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA</b>			
62	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
63	Bagi Hasil Retribusi	190.000.000,00	41.513.750,00	21,85
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
65	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (62 S/D 64)</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>41.513.750,00</b>	<b>21,85</b>
66	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58 + 65)</b>	<b>1.631.397.418.692,16</b>	<b>1.443.011.683.822,19</b>	<b>88,45</b>
67				
68	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 66)</b>	<b>(221.767.884.737,57)</b>	<b>7.309.188.256,68</b>	<b>(3,30)</b>

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NO.	URAIAN	Anggaran 2011	Realisasi 2011	%	Realisasi 2010
70	<b>PEMBIAYAAN</b>				
71					
72	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
73	Penggunaan SILPA	220.755.627.297,57	220.755.627.297,57	100,00	242.639.271.983,78
74	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.300.000.000,00	476.460.900,00	36,65	892.262.500,00
78	Penerimaan Piutang Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
79	<b>Jumlah Penerimaan (73 s/d 78)</b>	<b>222.255.627.297,57</b>	<b>221.232.088.197,57</b>	<b>99,54</b>	<b>243.531.534.483,78</b>
80					
81	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
82	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	988.921.073,87
85	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	487.742.560,00	401.899.250,00	82,40	0,00
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
89	<b>Jumlah Pengeluaran (82 s/d 88)</b>	<b>487.742.560,00</b>	<b>401.899.250,00</b>	<b>82,40</b>	<b>10.988.921.073,87</b>
90	<b>PEMBIAYAAN NETO (79 - 89)</b>	<b>221.767.884.737,57</b>	<b>220.830.188.947,57</b>	<b>99,58</b>	<b>232.562.613.409,89</b>
91					
92	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (68 + 90)</b>	<b>0,00</b>	<b>228.139.377.204,25</b>		<b>220.755.627.297,57</b>

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 4 Tahun 2013

Tanggal : 19 Juli 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2012	Realisasi 2012	%	Realisasi 2011
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	37.242.520.504,00	40.288.363.990,00	108,18	32.449.080.866,10
4	Pendapatan Retribusi Daerah	22.103.845.195,00	24.818.889.408,00	112,28	21.621.743.609,84
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.560.721.446,82	14.503.063.660,51	93,20	9.983.335.503,89
6	Lain-Lain PAD yang sah	57.939.023.075,00	59.904.266.941,86	103,39	49.310.393.490,04
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>132.846.110.220,82</b>	<b>139.514.584.000,37</b>	<b>105,02</b>	<b>113.364.553.469,87</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana bagi hasil Pajak	68.435.301.585,00	71.752.154.023,00	104,85	66.091.527.936,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	19.869.950.558,00	29.431.300.080,00	148,12	18.863.553.181,00
13	Dana Alokasi Umum	1.030.217.037.000,00	1.030.217.037.000,00	100,00	815.156.279.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	67.656.190.000,00	67.656.190.000,00	100,00	81.911.900.000,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>1.186.178.479.143,00</b>	<b>1.199.056.681.103,00</b>	<b>101,09</b>	<b>982.023.260.117,00</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00		30.041.884.942,00
19	Dana Penyesuaian	209.618.226.000,00	210.000.496.000,00	100,18	201.938.581.920,00
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>209.618.226.000,00</b>	<b>210.000.496.000,00</b>	<b>100,18</b>	<b>231.980.466.862,00</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	82.306.549.441,00	82.426.500.031,00	100,15	87.622.916.704,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	0,00	0,00		0,00
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>82.306.549.441,00</b>	<b>82.426.500.031,00</b>	<b>100,15</b>	<b>87.622.916.704,00</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 +25)</b>	<b>1.478.103.254.584,00</b>	<b>1.491.483.677.134,00</b>	<b>100,91</b>	<b>1.301.626.643.683,00</b>
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	1.132.540.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	59.147.450.000,00	59.115.450.000,00	99,95	35.329.674.926,00
32	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>60.279.990.000,00</b>	<b>59.115.450.000,00</b>	<b>98,07</b>	<b>35.329.674.926,00</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)</b>	<b>1.671.229.354.804,82</b>	<b>1.690.113.711.134,37</b>	<b>101,13</b>	<b>1.450.320.872.078,87</b>
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	1.022.139.152.108,00	954.417.082.827,00	93,37	820.555.147.251,25
38	Belanja Barang	234.755.199.483,07	205.837.086.906,97	87,68	206.129.849.687,06
39	Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00
40	Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00
41	Belanja Hibah	106.902.082.965,00	70.523.019.415,00	65,97	51.989.911.826,00
42	Belanja Bantuan Sosial	24.323.751.000,00	22.830.673.000,00	93,86	64.718.188.229,88
43	Belanja Bantuan Keuangan	76.350.000.000,00	71.805.778.390,00	94,05	47.127.607.840,00
44	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 43)</b>	<b>1.464.470.185.556,07</b>	<b>1.325.413.640.538,97</b>	<b>90,50</b>	<b>1.190.520.704.834,19</b>
45					



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NO.	URAIAN	Anggaran 2012	Realisasi 2012	%	Realisasi 2011
46	<b>BELANJA MODAL</b>				
47	Belanja Tanah	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00	1.629.468.000,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	83.885.507.803,00	63.973.345.544,00	79,09	58.950.709.497,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	71.687.769.050,00	62.422.538.680,88	67,08	48.938.783.476,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	226.705.059.600,00	214.849.022.092,39	94,68	139.863.428.795,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.894.210.000,00	14.425.847.200,00	96,86	264.825.500,00
52	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)	394.184.796.453,00	355.481.803.517,18	90,18	250.847.215.238,00
54					
55	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
56	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1.602.250.000,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga (56)	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1.602.250.000,00
58	<b>JUMLAH BELANJA (44+53+57)</b>	<b>1.863.684.982.009,07</b>	<b>1.680.898.444.056,18</b>	<b>90,19</b>	<b>1.442.970.170.072,19</b>
59					
60	<b>TRANSFER</b>				
61	<b>TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA</b>				
62	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Bagi Hasil Retribusi	1.933.750.000,00	1.780.517.950,00	92,08	41.513.750,00
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
65	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (62 s/d 64)	<b>1.933.750.000,00</b>	<b>1.780.517.950,00</b>	<b>92,08</b>	<b>41.513.750,00</b>
66	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58 + 65)</b>	<b>1.665.588.732.009,07</b>	<b>1.682.675.962.006,18</b>	<b>90,29</b>	<b>1.443.011.683.822,19</b>
67					
68	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 68)</b>	<b>(194.359.377.204,25)</b>	<b>7.437.749.128,22</b>	<b>(3,83)</b>	<b>7.306.188.256,68</b>
69					
70	<b>PEMBIAYAAN</b>				
71					
72	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
73	Penerimaan SILPA	228.139.377.204,25	228.139.377.204,25	100,00	220.755.627.297,57
74	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	398.882.200,00	79,37	476.460.900,00
78	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
79	Jumlah Penerimaan (73 s/d 78)	<b>228.639.377.204,25</b>	<b>226.936.259.404,25</b>	<b>99,67</b>	<b>221.232.088.197,57</b>
80					
81	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
82	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Panyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	34.100.000.000,00	34.000.000.000,00	99,71	0,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	380.000.000,00	201.356.063,00	52,99	401.899.250,00
86	Pembelian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembelian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembelian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Jumlah Pengeluaran (82 s/d 88)	<b>34.480.000.000,00</b>	<b>34.201.356.063,00</b>	<b>99,19</b>	<b>401.899.250,00</b>
90	<b>PEMBIAYAAN NETO (79 - 89)</b>	<b>194.359.377.204,25</b>	<b>194.334.883.341,25</b>	<b>99,99</b>	<b>220.890.188.947,57</b>
91					
92	<b>Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (68 + 90)</b>	<b>0,00</b>	<b>201.772.632.469,47</b>		<b>228.139.377.204,25</b>

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANG  
 Nomor : 07 Tahun 2014  
 Tanggal : 04 Juli 2014

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANG**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dalam Rupiah) HAL : 1/2

No.	Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PAD</b>				
3	Pajak Daerah	59.715.979.322,00	65.938.865.334,00	110,42	40.288.363.990,00
4	Retribusi Daerah	28.694.945.392,00	28.690.651.431,00	100,53	24.818.889.408,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.066.339.289,58	14.141.339.289,58	88,02	14.593.063.660,51
6	Lain-Lain PAD yang Sah	68.926.331.381,09	74.504.021.387,28	106,09	58.904.266.941,86
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	177.802.596.394,67	183.235.877.421,88	106,78	138.514.584.000,37
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	47.921.983.463,00	50.239.495.154,00	104,84	71.752.154.823,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	27.766.706.295,00	32.132.922.072,00	115,72	29.431.300.080,00
13	Dana Alokasi Umum	1.154.495.171.000,00	1.154.495.171.000,00	100,00	1.030.217.037.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	76.997.760.000,00	76.997.760.000,00	100,00	67.656.190.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	1.207.181.420.758,00	1.313.865.318.226,00	108,61	1.199.095.681.103,00
16					
17	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00		
19	Dana Penyesuaian	304.103.298.240,00	293.366.228.000,00	96,47	210.000.496.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	304.103.298.240,00	293.366.228.000,00	96,47	210.000.496.000,00
21					
22	Transfer Pemerintah Provinsi				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	92.490.251.512,00	95.581.380.288,00	103,32	82.428.500.031,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	92.490.251.512,00	95.581.380.288,00	103,32	82.428.500.031,00
26	Total Pendapatan Transfer (15-20+25)	1.703.776.158.510,00	1.702.794.928.482,00	99,94	1.491.483.677.134,00
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	1.814.810.000,00	411.010.863,00	25,45	0,00
30	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	30.187.365.000,00	30.618.220.500,00	101,42	58.115.450.000,00
32	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	31.802.185.000,00	31.027.231.483,00	97,56	58.115.450.000,00
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)</b>	<b>1.907.179.909.904,67</b>	<b>1.917.058.035.075,86</b>	<b>100,52</b>	<b>1.890.113.711.134,37</b>
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	1.136.678.345.233,00	1.049.837.632.185,00	92,38	954.417.082.927,00
38	Belanja Barang	296.769.156.834,14	257.770.895.466,87	86,88	206.837.066.806,97
39	Belanja Rangsang	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Hibah	108.484.582.489,00	94.680.989.952,00	88,82	70.523.019.415,00
42	Belanja Bantuan Sosial	11.879.000.000,00	11.270.125.000,00	94,87	22.830.673.000,00
43	Belanja Bantuan Keuangan	70.583.000.000,00	68.855.441.390,00	94,72	71.805.779.390,00
44	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 43)	1.824.394.084.556,14	1.480.425.063.992,87	91,14	1.325.413.640.538,97
45					

## ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

(Dalam Rupiah) HAL : 2/2

No.	Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
46	<b>BELANJA MODAL</b>				
47	Tanah	19.167.450.000,00	220.436.250,00	1,15	12.250.000,00
48	Peralatan dan Mesin	82.535.013.302,00	74.513.020.075,00	90,26	63.973.345.544,00
49	Gedung dan Bangunan	134.592.366.881,00	121.900.264.947,00	90,57	62.422.336.680,88
50	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.851.748.635,00	205.771.414.896,00	87,25	214.646.022.082,30
51	Aset Tetap Lainnya	2.601.878.000,00	2.459.066.800,00	94,56	14.425.847.200,00
52	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<b>Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)</b>	<b>474.748.467.818,00</b>	<b>404.960.203.010,00</b>	<b>85,28</b>	<b>355.481.803.517,18</b>
54					
55	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
56	Belanja Tidak Terduga	4.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (56)</b>	<b>4.250.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58	<b>JUMLAH BELANJA (44+53+57)</b>	<b>2.103.392.542.374,14</b>	<b>1.885.285.287.002,67</b>	<b>89,63</b>	<b>1.680.893.444.056,15</b>
59					
60	<b>TRANSFER</b>				
61	<b>TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA</b>				
62	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	1.060.000.000,00	1.023.802.850,00	96,59	1.780.517.950,00
64	Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
65	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (62 s/d 64)</b>	<b>1.060.000.000,00</b>	<b>1.023.802.850,00</b>	<b>96,59</b>	<b>1.780.517.950,00</b>
66	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58+65)</b>	<b>2.104.452.542.374,14</b>	<b>1.886.309.089.852,67</b>	<b>89,63</b>	<b>1.682.673.962.006,15</b>
67					
68	<b>SURPLUS/DEFSIT (33-66)</b>	<b>(197.272.632.469,47)</b>	<b>30.748.965.224,19</b>	<b>(15,59)</b>	<b>7.437.749.128,22</b>
69					
70	<b>PEMBIAYAAN</b>				
71	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
72	Penggunaan SIPA	201.772.632.469,47	201.772.632.469,47	100,00	228.189.377.204,25
73	Pencarian Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Disahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pinjaman dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman	500.000.000,00	159.090.000,00	31,82	396.862.200,00
76	<b>Jumlah Penerimaan (72 s/d 75)</b>	<b>202.272.632.469,47</b>	<b>201.931.722.469,47</b>	<b>99,83</b>	<b>228.586.239.404,25</b>
77					
78					
79	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
80	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Ponyoritan Modal (Investasi) Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	34.000.000.000,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	201.356.063,00
84	Pembelian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembelian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pembelian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
87	<b>Jumlah Pengeluaran (80 s/d 86)</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.201.356.063,00</b>
88	<b>PEMBIAYAAN NETO (77-87)</b>	<b>197.272.632.469,47</b>	<b>196.831.722.469,47</b>	<b>99,83</b>	<b>184.334.883.341,25</b>
89	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (88+88)	0,00	227.680.687.693,66		201.772.632.469,47

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 Nomor : 4 Tahun 2015  
 Tanggal : 22 Juli 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah) HAL : 1/2

No.	Uraian	Ref.	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.2.1				
2	<b>PAD</b>	5.2.1.1				
3	Pajak Daerah		69.440.753.110,00	94.133.355.279,62	135,56	65.939.965.334,00
4	Retribusi Daerah		64.340.151.940,00	67.276.765.522,00	104,56	28.650.551.431,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.929.867.000,00	15.562.622.841,37	97,69	14.141.339.289,58
6	Lain-Lain PAD yang Sah		75.398.071.303,75	106.515.959.538,04	141,27	74.504.021.367,28
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>		<b>225.108.843.353,75</b>	<b>283.488.703.181,03</b>	<b>125,93</b>	<b>183.235.877.421,86</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.2.1.2				
9	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	5.2.1.2.a				
10	Dana Bagi Hasil Pajak		42.762.852.388,00	47.957.905.245,00	112,15	50.239.465.154,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		43.171.504.646,00	37.117.104.474,00	85,98	32.132.922.072,00
12	Dana Alokasi Umum		1.254.496.229.000,00	1.254.496.229.000,00	100,00	1.154.495.171.000,00
13	Dana Alokasi Khusus		64.053.640.000,00	48.040.230.000,00	75,00	76.997.760.000,00
14	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)</b>		<b>1.404.484.226.034,00</b>	<b>1.387.611.468.719,00</b>	<b>98,80</b>	<b>1.313.865.318.226,00</b>
15	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	5.2.1.2.b				
16	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00		0,00
17	Dana Penyesuaian		292.405.155.949,00	304.287.104.000,00	104,06	293.368.228.000,00
18	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 17)</b>		<b>292.405.155.949,00</b>	<b>304.287.104.000,00</b>	<b>104,06</b>	<b>293.368.228.000,00</b>
19	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	5.2.1.2.c				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		141.941.014.556,00	161.298.343.868,00	113,64	95.561.380.266,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Transfer Pemerintah Provinsi		135.896.253.200,00	135.820.424.300,00	99,94	30.616.220.500,00
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 22)</b>		<b>277.837.267.756,00</b>	<b>297.118.768.168,00</b>	<b>113,84</b>	<b>126.177.600.766,00</b>
24	<b>Total Pendapatan Transfer (14+18+23)</b>		<b>1.974.726.649.739,00</b>	<b>1.989.017.340.887,00</b>	<b>100,72</b>	<b>1.733.411.146.992,00</b>
25	<b>LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.2.1.3				
26	Pendapatan Hibah		142.642.687.989,00	146.456.274.771,00	102,67	411.010.663,00
27	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (26 s/d 28)</b>		<b>142.642.687.989,00</b>	<b>146.456.274.771,00</b>	<b>102,67</b>	<b>411.010.663,00</b>
30	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7+24+29)</b>		<b>2.342.478.181.081,75</b>	<b>2.418.962.318.839,03</b>	<b>103,27</b>	<b>1.917.058.035.076,86</b>

## ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

No.	Uraian	Ref.	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
31	<b>BELANJA</b>	5.2.2				
32	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.2.2.1				
33	Belanja Pegawai		1.252.168.914.744,00	1.147.862.041.253,09	91,67	1.049.837.632.185,00
34	Belanja Barang		469.610.400.056,00	436.431.864.175,36	92,93	257.770.995.465,67
35	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Hibah		92.992.383.649,00	72.860.137.523,00	78,35	94.690.969.952,00
38	Belanja Bantuan Sosial		10.724.020.000,00	10.026.215.000,00	93,49	11.270.125.000,00
39	Belanja Bantuan Keuangan		75.800.000.000,00	70.409.219.909,00	92,89	68.855.441.390,00
40	<b>Jumlah Belanja Operasi (33 s/d 39)</b>		<b>1.901.295.716.479,00</b>	<b>1.737.588.478.560,45</b>	<b>91,39</b>	<b>1.480.425.063.992,67</b>
41	<b>BELANJA MODAL</b>	5.2.2.2				
42	Tanah		10.507.215.100,00	2.514.349.480,00	23,93	220.436.250,00
43	Peralatan dan Mesin		93.096.308.463,00	80.851.028.366,00	86,85	74.513.020.075,00
44	Gedung dan Bangunan		149.480.778.162,00	116.190.878.084,50	77,73	121.900.264.947,00
45	Jalan, Irigasi dan Jaringan		378.653.293.458,00	363.899.970.772,23	93,46	205.771.414.938,00
46	Aset Tetap Lainnya		16.782.119.157,00	5.090.449.825,00	30,33	2.455.066.000,00
47	Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
48	<b>Jumlah Belanja Modal (42 s/d 47)</b>		<b>646.519.714.340,00</b>	<b>558.546.677.147,73</b>	<b>86,13</b>	<b>404.860.203.010,00</b>
49	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	5.2.2.3				
50	Belanja Tidak Terduga		4.029.435.936,41	0,00	0,00	0,00
51	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (50)</b>		<b>4.029.435.936,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	<b>JUMLAH BELANJA (40+48+51)</b>		<b>2.553.844.866.775,41</b>	<b>2.296.136.155.708,18</b>	<b>89,91</b>	<b>1.885.285.267.002,67</b>
53	<b>TRANSFER</b>					
54	<b>TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA</b>	5.2.2.4				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa		0,00	0,00		0,00
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa		3.424.000.000,00	3.171.740.750,00	92,63	1.023.802.850,00
57	Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
58	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (55 s/d 57)</b>		<b>3.424.000.000,00</b>	<b>3.171.740.750,00</b>	<b>92,63</b>	<b>1.023.802.850,00</b>
59	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (52+58)</b>		<b>2.557.268.866.775,41</b>	<b>2.299.307.896.458,18</b>	<b>89,91</b>	<b>1.886.309.069.852,67</b>
60	<b>SURPLUS/DEFISIT (30-59)</b>		<b>(214.790.687.893,88)</b>	<b>119.654.422.380,85</b>	<b>(55,71)</b>	<b>30.748.965.224,19</b>
61	<b>PEMBIAYAAN</b>					
62	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.2.3.1				
63	Penggunaan SILPA		227.690.687.693,66	227.690.687.693,66	100,00	201.772.632.469,47
64	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pinjaman dalam Negeri		10.000.000,00	12.350.000,00	0,00	159.030.000,00
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0,00	0,00	0,00	0,00
68	<b>Jumlah Penerimaan (63 s/d 67)</b>		<b>227.690.687.693,66</b>	<b>227.690.037.693,66</b>	<b>100,00</b>	<b>201.931.722.469,47</b>
69	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.2.3.2				
70	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

No.	Uraian	Ref.	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
71	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		12.900.000.000,00	12.900.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Pembayaran Utang Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>Jumlah Pengeluaran (70 s/d 76)</b>		<b>12.900.000.000,00</b>	<b>12.900.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
78	<b>PEMBIAYAAN NETO (68-77)</b>	5.2.3	<b>214.790.687.693,66</b>	<b>214.793.037.693,66</b>	<b>100,00</b>	<b>196.931.722.469,47</b>
79	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60+78)</b>		<b>0,00</b>	<b>334.447.460.074,51</b>		<b>227.680.687.693,66</b>

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS